

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) adalah pondasi utama bagi operasional dan kekuatan militer suatu negara, termasuk Indonesia. Alutsista didefinisikan sebagai seluruh perlengkapan militer yang dipakai untuk menjaga kedaulatan nasional; meliputi kendaraan tempur, sistem persenjataan, pesawat angkut dan tempur, sistem pertahanan udara, bahkan perangkat komunikasi dan teknologi pengawasan. Pada Matra TNI Angkatan Udara, alutsista mencakup berbagai elemen penting seperti pesawat tempur generasi terbaru, helikopter angkut dan peninjau, rudal, sistem radar, serta alat komunikasi yang mendukung efektivitas operasi udara. Keberadaan alutsista yang mutakhir dan selalu siap operasional sangat penting guna menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia yang sangat luas dan bernilai strategis tinggi. Tanpa alutsista yang memadai dan berdaya guna optimal, kemampuan pertahanan negara akan sangat terbatas dan rentan terhadap berbagai ancaman, baik dari negara lain maupun kelompok non-negara yang dapat mengganggu keamanan nasional. (Andalus & Djuyandi : 2022)

Namun dalam praktiknya, pengembangan dan pemeliharaan alutsista di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, terutama terkait efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran pertahanan. Di masa kepemimpinan Presiden Prabowo yang menjabat sejak 2024, persoalan efisiensi dan efektivitas anggaran dalam mendukung modernisasi serta pemeliharaan alutsista menjadi sangat esensial untuk ditelaah secara mendalam. Indonesia sebagai negara berkembang dengan wilayah kepulauan yang luas memiliki kebutuhan pertahanan yang besar, namun di sisi lain harus mampu mengalokasikan anggaran secara optimal agar dana yang terbatas bisa memberi manfaat maksimal. Dalam konteks tersebut, efisiensi anggaran merujuk pada kemampuan Kementerian Pertahanan untuk menggunakan dana yang ada seoptimal mungkin dalam perolehan, pemeliharaan, dan pengembangan alutsista tanpa mengorbankan kualitas dan kesiapan operasionalnya. Sedangkan efektivitas anggaran mengacu pada pencapaian hasil sesuai tujuan strategis dengan penggunaan sumber daya yang

tersedia, yakni memperoleh dampak maksimal dari belanja yang dilakukan. (Duarte et al. : 2025)

Isu alutsista Indonesia sering kali menjadi pembanding yang kurang menguntungkan jika disandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand telah melakukan modernisasi alutsista secara berhasil dengan dukungan anggaran yang terkelola baik serta strategi pengadaan yang terencana dan transparan. Singapura, misalnya, dikenal memiliki anggaran pertahanan yang besar dan efisien dengan alutsista canggih dan berteknologi tinggi yang menunjang kemampuan operasional superior. Malaysia dan Thailand juga unggul dalam pengelolaan anggaran mereka dengan prioritas pada modernisasi teknologi dan peningkatan kapabilitas militer secara berkesinambungan. Sementara itu, alutsista Indonesia masih sering mengalami kendala klasik seperti ketergantungan pada alutsista lawas yang sudah usang, proses pengadaan yang berliku dan memakan waktu lama, serta ketidakpastian dalam proses distribusi anggaran. Hal ini menyebabkan kesiapan operasional belum optimal dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai seberapa efisien dan efektif pengeluaran dana pertahanan, khususnya pada matra TNI Angkatan Udara. (Karyadie : 2024)

Kesenjangan alutsista Indonesia dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lain dapat dipahami dari beberapa dimensi. Pertama, dari sisi usia dan teknologi, banyak alutsista Indonesia yang masih mengandalkan peralatan lama yang sudah melewati batas penggunaan optimal, sehingga sering mengalami kerusakan dan menuntut biaya pemeliharaan tinggi. Kedua, dalam aspek modernisasi, negara-negara tetangga lebih progresif dalam memperbarui dan mengakuisisi alutsista dengan teknologi terkini yang memungkinkan peningkatan efektivitas dan daya guna. Ketiga, birokrasi yang rumit dan proses pengadaan yang tidak selalu transparan dan cepat menjadi hambatan besar dalam mempercepat modernisasi alutsista. Keempat, masalah korupsi dan inefisiensi dalam prosedur anggaran juga turut melemahkan efektivitas penggunaan dana pertahanan. Keseluruhan faktor ini berdampak pada rendahnya kesiapan alutsista TNI Angkatan Udara dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan udara Indonesia. (Sumarno et al., : 2025)

Di Matra TNI Angkatan Udara, alutsista mencakup berbagai elemen krusial seperti pesawat tempur, pesawat angkut, drone, helikopter, sistem radar, rudal, serta alat komunikasi modern, yang seluruhnya mendukung efektivitas operasi udara dan kesiapsiagaan nasional. Modernisasi alutsista menjadi kebutuhan mendesak guna menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks serta dinamika geopolitik kawasan dan global. Pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, modernisasi dan penambahan alutsista TNI AU menjadi prioritas utama melalui penguatan anggaran pertahanan dan optimalisasi kebijakan pengadaan.

Beberapa jenis dan nama alutsista mutakhir yang telah hadir atau resmi dipesan untuk memperkuat Matra Udara meliputi:

Pesawat Tempur Rafale (Prancis): Indonesia menandatangani kontrak pengadaan hingga 42 unit Rafale, generasi terbaru pesawat tempur multirole yang memiliki kapabilitas serangan udara dan elektronik tinggi. Tahap pengiriman pertama dijadwalkan mulai 2026, namun proses persiapan dan penyesuaian infrastruktur sudah berjalan di tahun 2025.

Pesawat Tempur KAAN (Turki): Sebanyak 48 jet tempur generasi kelima KAAN buatan Turkish Aerospace Industries dipesan, dengan proses penandatanganan kontrak pada pertengahan 2025. Pesawat ini berteknologi siluman dan dilengkapi avionik modern.

Pesawat Angkut Airbus A400M: TNI AU mendapatkan dua unit pesawat angkut berat dan tanker Airbus A400M, yang mampu mengangkut personel dan material dalam berbagai operasi taktis. Pengiriman A400M dijadwalkan tiba November 2025, memperkuat kemampuan logistik serta mobilisasi pasukan udara.

Jet Latih Tempur T-50i Golden Eagle (Korea Selatan): Pengadaan enam unit pesawat latih tempur T-50i memperkuat skadron edukasi dan pelatihan tempur TNI

AU. Dua unit pertama dijadwalkan tiba pada November 2025, mendukung program Lead-In Fighter Training dan regenerasi pilot tempur.

Drone Tempur ANKA-S (Turki): TNI AU mengakuisisi 12 unit drone tempur ANKA-S pada September 2025, memperkuat operasi intelijen, pengawasan, dan serangan presisi. Drone ini mampu terbang hingga 33 jam nonstop serta dilengkapi dengan rudal, bom pintar, dan sistem pengintaian elektronik canggih.

Calon Jet Tempur Chengdu J-10C (China): Indonesia sedang dalam tahap peninjauan untuk mengakuisisi J-10C, jet tempur multirole berteknologi tinggi dari China sebagai tambahan armada masa depan.

Sistem Radar dan Rudal Pertahanan Udara Berlapis: TNI AU memperkuat sistem pertahanan dengan radar jarak jauh dan sistem rudal permukaan-ke-udara berteknologi terbaru untuk deteksi dini dan penangkalan ancaman lintas batas.

Langkah modernisasi ini bukan hanya respons terhadap kesenjangan alutsista Indonesia dibandingkan negara Asia Tenggara lain yang telah maju dalam pengadaan dan pengelolaan alat militer, tetapi juga sebuah strategi memperkuat postur pertahanan udara nasional agar mampu menghadapi ancaman masa depan dengan teknologi dan operasi yang setara atau melebihi negara tetangga. Namun, pengadaan dan pemeliharaan alutsista di Indonesia masih menghadapi kendala birokrasi, ketergantungan pada alat lama, transparansi, serta kapasitas anggaran yang terbatas. Kebijakan efisiensi yang digulirkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menuntut penggunaan anggaran secara optimal, fokus pada belanja prioritas, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan. Realokasi dan pemangkasan program non-prioritas memastikan setiap dana difokuskan pada modernisasi alutsista dan kesejahteraan prajurit. Efektivitas implementasi pengadaan alutsista selama era Presiden Prabowo menentukan kesiapan operasional, profesionalisme pasukan, serta posisi Indonesia sebagai pelindung kedaulatan wilayah udara di tingkat regional dan global. (Sarjito et al. : 2024)

Keberhasilan politik anggaran dan efisiensi pembelanjaan pertahanan akan menjadi motor utama penguatan sistem pertahanan dan keamanan negara dalam menyoong tantangan strategis, inovasi teknologi, dan modernisasi industri pertahanan nasional. Sebagai institusi yang menjadi pemegang kebijakan anggaran pertahanan, Kementerian Pertahanan harus mampu mengatasi berbagai hambatan tersebut dengan menerapkan strategi tepat agar alutsista matra udara dapat mengalami peningkatan signifikan dari sisi kuantitas dan kualitas. Kebijakan anggaran di sektor pertahanan tidak hanya terbatas pada besaran dana yang dialokasikan, melainkan juga bagaimana dana tersebut dikelola dan diprioritaskan secara strategis sehingga bisa menghasilkan efisiensi dan efektivitas maksimal. Dalam konteks era Presiden Prabowo, penekanan ditempatkan pada optimalisasi anggaran sebagai upaya mengurangi pemborosan, mempercepat prosedur pengadaan, memperkuat pengawasan penggunaan anggaran, serta memperkuat kerja sama dengan industri domestik supaya mampu menekan ketergantungan impor alutsista yang mahal dan memakan waktu lama. (Sarjito et al. : 2024)

Langkah ini diarahkan untuk memperkuat kebijakan anggaran pertahanan guna mendukung kebutuhan alutsista yang makin kompleks dan menuntut kesiapan tinggi dalam menghadapi dinamika geopolitik regional dan global saat ini. Dari segi efisiensi anggaran, Kementerian Pertahanan wajib merumuskan kebijakan alokasi dana yang tepat sasaran, berfokus pada perbaikan dan modernisasi alat yang selama ini tertinggal, serta investasi pada teknologi berkelanjutan. Efisiensi bukan sekadar pemotongan dana, tetapi pencapaian target maksimal dengan sumber daya minimal melalui pengelolaan akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil. Artinya, setiap rupiah yang dialokasikan harus mampu menjawab kebutuhan strategis alutsista dalam kerangka pertahanan nasional yang komprehensif. Dengan demikian, bukan hanya jumlah alutsista bertambah, tetapi juga kualitas dan kesiapan operasionalnya yang mampu menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara tetangga dalam kapabilitas mempertahankan wilayah udara. (Fanani et al.: 2024)

Perbandingan kondisi alutsista Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya menunjukkan disparitas nyata, erat kaitannya dengan kendala kebijakan anggaran yang rumit. Negara-negara tetangga mampu menjalankan kebijakan anggaran pertahanan yang efektif karena didukung oleh sistem

perencanaan matang, pengawasan internal dan eksternal ketat, serta sinergi kuat antara militer, pemerintah, dan industri pertahanan domestik. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi berbagai isu struktural seperti koordinasi antar lembaga yang belum optimal, proses pengadaan yang rawan penyimpangan, serta keterbatasan kapasitas industri dalam negeri yang belum mampu memenuhi kebutuhan alutsista secara mandiri. Faktor-faktor ini menjadi tantangan besar memperbaiki efisiensi dan efektivitas anggaran alutsista pada Matra TNI Angkatan Udara. Untuk itu, penguatan sinergi pemangku kepentingan dan reformasi birokrasi menjadi kunci utama agar anggaran dialokasikan benar-benar memberikan output sesuai kebutuhan pertahanan yang dinamis. (Susdarwono & Wiranta : 2024)

Eksplorasi lebih lanjut mengenai efisiensi dan efektivitas anggaran pengadaan alutsista pada Matra TNI Angkatan Udara di era Presiden Prabowo penting untuk mengidentifikasi faktor penyebab tertinggalnya alutsista Indonesia dan mencari solusi terbaik lewat kebijakan anggaran yang tepat. Studi kasus tersebut dapat memberi gambaran detail terkait besarnya anggaran, proses pengadaan, tingkat pemanfaatan, serta hambatan selama implementasi kebijakan. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan refleksi dan rekomendasi bagi pemerintah dan Kementerian Pertahanan dalam mengelola anggaran pertahanan dengan konsep efisiensi berkelanjutan dan hasil yang terukur, sehingga Indonesia mengejar ketertinggalannya dan meningkatkan kapabilitas pertahanan nasional. Dengan demikian, politik anggaran di sektor pertahanan khususnya alutsista Matra TNI Angkatan Udara bukan sekadar fenomena administratif, melainkan motor utama memperkuat kedaulatan dan keamanan negara dalam menghadapi tantangan strategis yang semakin kompleks. (Budiman et al. : 2021)

Politik anggaran merupakan aspek fundamental dalam pengelolaan pemerintahan yang berdampak langsung pada efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya negara. Dalam konteks Indonesia, pengelolaan anggaran di sektor pertahanan sangat penting mengingat peran Kementerian Pertahanan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan. Di era globalisasi dengan tantangan kompleks, pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan harus menjadi keharusan agar sumber daya yang ada bisa dimanfaatkan optimal. Pada awal 2025, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi

Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai langkah konkret memastikan setiap rupiah dari kas negara memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pusat dan daerah. Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diwajibkan menyesuaikan anggaran, bahkan beberapa pos dikurangi hingga 90%. (Darmawan et al. : 2025)

Kebijakan efisiensi anggaran berdampak besar pada Kementerian Pertahanan dan TNI sebagai salah satu penerima alokasi terbesar dalam APBN. Pada 2025, Kemhan dan TNI melakukan efisiensi sebesar Rp26,993 triliun dari pagu awal Rp166,2 triliun, sehingga alokasi akhir menjadi Rp139,2 triliun. Pemangkasan terutama menyoar pada modernisasi alutsista (yang menjadi kebutuhan utama TNI AU) justru melonjak lebih dari 50% menjadi Rp65,5 triliun pada alokasi anggaran akhir tahun 2025. Sedangkan belanja operasional dan pegawai dipertahankan agar tidak mengganggu fungsi utama pertahanan. Langkah ini diharapkan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran agar sumber daya digunakan untuk program prioritas yang berdampak langsung pada penguatan sistem pertahanan nasional. Namun kebijakan ini juga memunculkan tantangan, seperti potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi di sektor yang bergantung pada pengeluaran pemerintah, termasuk industri MICE, infrastruktur daerah, dan belanja operasional pertahanan. Minimnya transparansi realokasi anggaran hasil efisiensi menjadi sorotan publik. (Hadi et al. : 2022)

Selain aspek teknis, kebijakan ini sarat dengan nuansa politik anggaran, karena menegaskan bahwa anggaran negara harus fokus pada peningkatan pelayanan publik, bukan sekadar pemerataan antar daerah atau mengikuti pola anggaran lama. Pembatasan belanja non-prioritas seperti seremonial, studi banding, perjalanan dinas, honorarium, dan kegiatan yang tidak memiliki output terukur adalah bagian dari instruksi tersebut, mendorong kementerian dan lembaga fokus pada kinerja pelayanan publik dan pencapaian target strategis nasional. Kebijakan efisiensi anggaran merupakan strategi pemerintah menghadapi tantangan ekonomi global dan menjaga stabilitas fiskal nasional. Pemerintah dan Kementerian Keuangan menekankan pentingnya perencanaan matang dan pelaksanaan efektif Anggaran 2025 agar menjadi instrumen pembangunan yang meningkatkan

pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kesenjangan sosial. Dalam konteks pertahanan, efisiensi harus dilakukan hati-hati agar kesiapsiagaan alutsista dan ketahanan nasional tidak terganggu.

Implementasi kebijakan efisiensi di Kemhan dan TNI menghadapi tantangan birokrasi dan dinamika politik internal. Identifikasi dan pemangkasan program yang tak mendesak memerlukan evaluasi menyeluruh dan koordinasi lintas unit. Pengawasan dan evaluasi berkala penting agar efisiensi selaras dengan kepentingan strategis dan tidak mengganggu tugas utama Kemhan dan TNI. Dana utama tersisa tetap difokuskan pada kebutuhan prioritas: modernisasi alutsista, peningkatan kualitas dan kesejahteraan SDM, pengelolaan sistem pertahanan siber, serta pembangunan infrastruktur penunjang pertahanan nasional. Pada 2025, belanja modernisasi alutsista melonjak lebih dari 50% menjadi Rp65,5 triliun, sedangkan pos SDM dan pengembangan teknologi mendapat porsi penting guna memperkuat komponen cadangan dan penguasaan teknologi strategis. Belanja pegawai, termasuk kesejahteraan prajurit, sekitar Rp50–54 triliun per tahun, sementara belanja barang dan modal didistribusikan untuk kebutuhan operasional, pemeliharaan sarana-prasarana, transfer teknologi, dan pengembangan kapasitas personel. (Imamia et al. : 2025)

Penelitian tentang efisiensi dan efektivitas anggaran di Kementerian Pertahanan sangat penting karena tiga alasan utama. Pertama, sebagai kementerian dengan pagu anggaran terbesar, kebijakan efisiensi berdampak langsung pada postur pertahanan—modernisasi alat tempur, kesiapsiagaan pasukan, dan stabilitas pengelolaan sumber daya. Kedua, efisiensi bukan sekadar pengurangan angka, tetapi menjaga keseimbangan antara kebutuhan strategis, tekanan fiskal, dan tuntutan transparansi publik. Ketiga, efisiensi yang tepat dapat menjadi role model sektor lain dan memperkuat kredibilitas pemerintah dalam memperkokoh pertahanan di tengah ancaman global dan regional yang kompleks.

Dengan demikian, politik anggaran Kementerian Pertahanan khususnya pada efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran alutsista Matra TNI Angkatan Udara di era Presiden Prabowo 2024-2025 adalah kunci strategis guna mewujudkan modernisasi, peningkatan kesiapsiagaan, dan penguatan kedaulatan wilayah udara Indonesia secara efektif dan berkelanjutan. Penataan kebijakan anggaran yang

terintegrasi dan transparan akan menjadi langkah penting bagi Indonesia menghadapi tantangan regional dan global di masa depan.

Fokus masalah penelitian ini Adalah Politik Anggaran di Kementerian Pertahanan pada era Presiden Prabowo 2024-2025, yang dikaji melalui kasus efisiensi dan efektivitas anggaran Alutsista TNI Angkatan Udara. Inti permasalahannya adalah adanya kesenjangan Alutsista Indonesia dibanding negara tetangga dan tantangan pengelolaan dana terbatas untuk modernisasi, yang dipengaruhi oleh faktor struktural seperti birokrasi rumit dan masalah inefisiensi. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Kemhan dalam meningkatkan efisiensi, mengukur efektivitas penggunaan anggaran dan membandingkan hasilnya dengan negara Asia Tenggara untuk mencari solusi kebijakan anggaran yang tepat bagi penguatan kedaulatan udara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, berikut adalah rumusan permasalahan yang akan membantu untuk membahas penelitian ini

1. Strategi dan kebijakan apa yang digunakan dalam penguatan alutsista di dalam matra TNI angkatan udara di kementerian Pertahanan dalam durasi jangka tengah sampai jangka panjang?
2. Peralatan Alutsista apa saja yang diperkuat di Matra TNI angkatan udara selama era Presiden Prabowo 2024-2025?
3. Bagaimana upaya penguatan alutsista di matra TNI angkatan udara dalam efisiensi dan efektivitas dalam alutsista kementerian pertahanan di era presiden Prabowo Subianto

1.3 Tujuan & Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk membedah dinamika politik anggaran di Kementerian Pertahanan selama masa transisi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto (2024-2025). Secara spesifik, penelitian ini hendak

menganalisis bagaimana proses pengambilan keputusan politik dalam alokasi anggaran alutsista pada matra TNI Angkatan Udara dilakukan, guna memahami interaksi antar aktor kepentingan dalam memperjuangkan prioritas pertahanan nasional di tengah keterbatasan fiskal negara.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi parameter efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran tersebut dalam mendukung agenda modernisasi kekuatan udara. Melalui evaluasi ini, diharapkan dapat teridentifikasi berbagai faktor determinan, baik penghambat maupun pendukung, yang memengaruhi percepatan transisi postur pertahanan dari *Minimum Essential Force* (MEF) menuju *Optimum Essential Force* (OEF).

Pada akhirnya, penelitian ini bermaksud mendeskripsikan dampak strategis dari kebijakan fiskal pertahanan terhadap posisi tawar kedaulatan dirgantara Indonesia di kawasan ASEAN. Dengan demikian, tujuan akhir dari penulisan ini adalah untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi pengelolaan anggaran pertahanan yang lebih transparan, akuntabel, dan memiliki sustainabilitas tinggi demi menjamin integritas wilayah NKRI di masa depan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk menghasilkan kontribusi yang substansial dan terukur, membagi manfaatnya ke dalam dua kategori utama, yaitu Manfaat Teoretis dan Manfaat Praktis.

A. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya khazanah keilmuan Ilmu Politik, khususnya pada kajian Politik Anggaran dan Kebijakan Pertahanan. Kontribusi utama studi ini terletak pada upaya pengisian kekosongan literatur yang secara spesifik menganalisis persinggungan antara dinamika politik kekuasaan dan kepentingan (*agency*) dengan

prinsip manajemen fiskal (*efficiency and effectiveness*) dalam konteks pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista).

Penelitian ini menyajikan kerangka analisis empiris yang komprehensif untuk menjelaskan bagaimana variabel-variabel politik internal dan eksternal memengaruhi implementasi kebijakan efisiensi anggaran di sektor pertahanan yang sarat kepentingan strategis. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis penting bagi akademisi dan peneliti di masa depan yang berfokus pada Tata Kelola Pertahanan (*Defense Governance*), Kebijakan Publik, dan studi komparatif politik anggaran di negara-negara berkembang.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat yang berupa konstruktif dan berbasis bukti bagi para pemangku kepentingan sektor pertahanan, khususnya Kemhan dan TNI AU melalui evaluasi efisiensi serta efektivitas anggaran Alutsista untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pengelolaan sumber daya demi mendukung kesiapan operasional dan modernisasi. Temuan penelitian ini juga menjadi rujukan bagi DPR RI terutama Komisi I, dalam memperkuat fungsi pengawasan anggaran agar alokasi dana pertahanan lebih tepat sasaran dan selaras dengan Rencana Strategis Pertahanan Negara. Selain itu, perbandingan dengan negara-negara ASEAN menyediakan tolok ukur yang memungkinkan Indonesia mengadopsi praktik terbaik dalam pengelolaan anggaran pertahanan guna memperkuat kapabilitas regional secara berkelanjutan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adanya sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dalam penyusunan penelitian, sehingga menghasilkan karya tulis yang terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Sistematika ini

dirancang untuk memastikan pembahasan yang runtut dan kohesif, mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan. Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bagian pembuka yang menjelaskan latar belakang penelitian secara mendalam. Pada bagian ini, penulis memulai dengan menggambarkan isu-isu umum yang berkaitan dengan topik penelitian, diikuti dengan penjelasan spesifik mengenai masalah yang hendak diteliti. Identifikasi masalah dilakukan untuk memberikan landasan kuat terhadap fenomena yang menjadi fokus utama penelitian. Bab ini juga mencakup perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Penulis menjelaskan kontribusi penelitian terhadap berbagai pihak, baik dari segi akademis, sosial, maupun praktis, khususnya dalam mendukung pengambilan keputusan bagi pemangku kebijakan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua memuat pembahasan mengenai berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Kajian pustaka dilakukan dengan meninjau literatur yang mencakup aspek-aspek serupa baik dari segi subjek, objek, maupun pendekatan analisis. Bagian ini juga menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai kerangka analisis, yang menjadi alat untuk memahami dan menjelaskan temuan penelitian. Selain itu, disajikan kerangka pemikiran yang menggambarkan alur logis penelitian, mulai dari identifikasi masalah hingga pendekatan solusi yang diusulkan.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini membahas secara terperinci metode penelitian yang digunakan. Penulis menjelaskan pendekatan penelitian yang dipilih, baik kualitatif maupun kuantitatif, disertai dengan alasan pemilihannya. Selanjutnya, diuraikan proses penentuan informan atau sampel penelitian, teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, atau studi dokumen, serta metode analisis data yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Bab ini juga mencakup lokasi penelitian dan jadwal pelaksanaannya sebagai gambaran waktu dan tempat penelitian dilakukan.

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menyajikan deskripsi umum mengenai konteks penelitian. Bagian ini mencakup pengenalan terhadap profil wilayah, kondisi geografis, demografi, atau karakteristik lain yang relevan dengan fokus penelitian. Bab ini merupakan inti dari keseluruhan penelitian. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk data atau temuan yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan diolah sesuai metode yang telah dijelaskan sebelumnya. Temuan tersebut kemudian dikaitkan dengan teori yang relevan, sehingga menghasilkan analisis yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Penulis mengintegrasikan temuan dengan permasalahan yang dirumuskan pada bab sebelumnya, sehingga mampu memberikan pemahaman baru atau perspektif yang berbeda terhadap topik penelitian.

BAB 5 PENUTUP

Bab terakhir merupakan bagian penutup yang berisi rangkuman dari keseluruhan pembahasan. Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu, penulis juga memberikan saran yang bersifat aplikatif maupun konseptual, sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bagian ini menjadi penutup yang menghubungkan seluruh isi penelitian dalam satu kesatuan yang utuh.